



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.90/M.PPN/HK/11/2013
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR RENCANA PROYEK INFRASTRUKTUR
TAHUN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur, perlu menyusun Daftar Rencana Proyek Infrastruktur;
 - b. bahwa Daftar Rencana Proyek Infrastruktur disusun dalam rangka meningkatkan partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013;
 3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN DAFTAR RENCANA PROYEK INFRASTRUKTUR TAHUN 2013.**
- PERTAMA :** Menetapkan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2013

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.90/M.PPN/HK/11/2013
TANGGAL 15 NOVEMBER 2013

DAFTAR RENCANA PROYEK
INFRASTRUKTUR TAHUN 2013

PROYEK KPS SIAP DITAWARKAN

I.1. TRANSPORTASI

I.1.1 .Transportasi Laut
Tidak Tersedia Pada Saat Ini

I.1.2. Transportasi Udara
Tidak Tersedia Pada Saat Ini

I.1.3. Perkeretaapian
Tidak Tersedia Pada Saat Ini

I.1.4. Transportasi Darat
Tidak Tersedia Pada Saat Ini

I. 2. JALAN TOL
Tidak Tersedia Pada Saat Ini

I.3. AIR MINUM
Tidak Tersedia Pada Saat Ini

I.4. SARANA PERSAMPAHAN
Tidak Tersedia Pada Saat Ini

I.5. TELEKOMUNIKASI
Tidak Tersedia Pada Saat Ini.

I.6. KELISTRIKAN
Tidak Tersedia Pada Saat Ini

I.7. MINYAK ...

I.7. MINYAK DAN GAS

I.7.1 Transmisi

Tidak Tersedia Pada Saat Ini

I.7.2 Distribusi

Tidak Tersedia Pada Saat Ini

PROYEK KPS PROSPEKTIF

II.1. TRANSPORTASI

II.1. 1. Transportasi Laut

Tidak Tersedia Pada Saat Ini

II.1. 2. Transportasi Udara

Tidak Tersedia Pada Saat Ini

II.1. 3. Perkeretaapian

1. Pembangunan Kereta Api Bandara Soekarno Hatta- Manggarai
2. Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage, Bandung
3. Revitalisasi Stasiun Kereta Api Tugu dan Pedestrianisasi Kawasan Malioboro, DI Yogyakarta

II.1. 4. Transportasi Darat

1. Revitalisasi Kawasan Terminal Keudah dan Peunayong, Kota Banda Aceh

II.2. JALAN TOL

1. Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
2. Jalan Tol Manado - Bitung
3. Jalan Tol Akses Tanjung Priok
4. Jalan Tol Balikpapan - Samarinda
5. Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung

II. 3. AIR MINUM

1. Air Minum Pondok Gede, Kota Bekasi
2. Air Minum Bali Selatan

II.4. SARANA PERSAMPAHAN

1. Pengelolaan dan Pengolahan Akhir Persampahan Kota Bogor dan Depok
2. Pengelolaan dan Pengolahan Akhir Persampahan Kota Surakarta

II.5. TELEKOMUNIKASI ...

II. 5. TELEKOMUNIKASI

Tidak Tersedia Pada Saat Ini

II. 6. KELISTRIKAN

1. PLTA Karama, Sulawesi Barat

II. 7. MINYAK DAN GAS

II. 7.1. Transmisi

Tidak Tersedia Pada Saat Ini

II. 7.2. Distribusi

Tidak Tersedia Pada Saat Ini

PROYEK KPS POTENSIAL

III.1. TRANSPORTASI

III.1.1. Transportasi Laut

1. Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy, Kalimantan Timur
2. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok di Cilamaya, Jawa Barat
3. Pengembangan Terminal Tanjung Sauh, Batam

III.1.2. Transportasi Udara

1. Pembangunan Bandar Udara Bali Baru
2. Bandar Udara Internasional Kulonprogo, DI Yogyakarta

III.1.3. Perkeretaapian

1. Pembangunan Kereta Api Pulau Baai-Muara Enim
2. Pembangunan Monorel Sumatera Selatan
3. Pengembangan Sistem Angkutan Massal Cepat Kota Surabaya
4. Pembangunan Monorel Kota Bandung

III.1.4. Transportasi Darat

Tidak Tersedia Pada Saat Ini

III.2. JALAN TOL

1. Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan
2. Jalan Tol Pandaan - Malang
3. Jalan Tol Pasir Koja - Soreang

III.3. AIR MINUM ...

III.3. AIR MINUM

Tidak Tersedia Pada Saat Ini

III.4. SARANA PERSAMPAHAN

1. Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta

III. 5. TELEKOMUNIKASI

Tidak Tersedia Pada Saat Ini

III.6. KELISTRIKAN

Tidak Tersedia Pada Saat Ini

III. 7. MINYAK DAN GAS

III. 7.1. Transmisi

Tidak Tersedia Pada Saat Ini

III. 7.2. Distribusi


Tidak Tersedia Pada Saat Ini

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun